

RASISME DI ERA DIGITAL: PERAN LITERASI DIGITAL DALAM KONFLIK NETIZEN ASIA TENGGARA DAN KOREA SELATAN

Naissa Shahira Kurniawati

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
naissashr23@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 07-05-26

Disetujui: 12-05-26

Keywords:

Digital racism
Digital Literacy
South Korea
Southeast Asia
Hate Speech
Social Media

Abstract: *This article examines the phenomenon of racism in the digital age, particularly in the context of relations between South Korea and Southeast Asian countries. As the influence of Korean culture (Hallyu)—which encompasses K-Pop, dramas, films, and the Korean lifestyle—spreads throughout Southeast Asia, various forms of digital racial discrimination have begun to surface. Its manifestations are diverse, ranging from hate speech on social media platforms such as YouTube, Twitter/X, and Korean online communities, to algorithm-based negative stereotypes that systematically reproduce racial hierarchies in the virtual world. Using a qualitative research approach grounded in a systematic literature review and critical discourse analysis of over 30 relevant academic sources, this article identifies patterns of digital racism, the structural factors exacerbating it—including algorithmic design, cultural power imbalances, and the lack of cross-border regulation—as well as the role of digital literacy as a tool to mitigate intercultural conflict. Findings suggest that adequate digital literacy, encompassing critical, ethical, and participatory skills, can serve as a bridge to reduce racial tensions in the digital realm. This article further proposes an anti-racist digital literacy model based on three pillars: critical awareness, ethical action, and transformative participation. Policy implications are recommended for formal educational institutions in South Korea and ASEAN countries, digital platforms, and regional stakeholders in efforts to build a more inclusive and discrimination-free digital ecosystem.*

Abstrak: Artikel ini mengkaji fenomena rasisme di era digital, khususnya dalam konteks hubungan antara Korea Selatan dan negara-negara Asia Tenggara. Seiring dengan meluasnya pengaruh budaya Korea (Hallyu)—yang mencakup K-Pop, drama, film, dan gaya hidup Korea—ke seluruh Asia Tenggara, berbagai bentuk diskriminasi rasial digital mulai muncul. Manifestasinya beragam, mulai dari ujaran kebencian di platform media sosial seperti YouTube, Twitter/X, dan komunitas daring Korea, hingga stereotip negatif berbasis algoritma yang secara sistematis mereproduksi hierarki rasial di dunia maya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang didasarkan pada tinjauan literatur sistematis dan analisis wacana kritis terhadap lebih dari 30 sumber akademis yang relevan, artikel ini mengidentifikasi pola-pola rasisme digital, faktor-faktor struktural yang memperparahnya—termasuk desain algoritma, ketidakseimbangan kekuatan budaya, dan kurangnya regulasi lintas batas—serta peran literasi digital sebagai alat untuk meredam konflik antarbudaya. Temuan menunjukkan bahwa literasi digital yang memadai, yang mencakup keterampilan kritis, etis, dan partisipatif, dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mengurangi ketegangan rasial di ranah digital. Artikel ini selanjutnya mengusulkan model literasi digital anti-rasisme yang didasarkan pada tiga pilar: kesadaran kritis, tindakan etis, dan partisipasi transformatif. Implikasi kebijakan direkomendasikan bagi lembaga pendidikan formal di Korea Selatan dan negara-negara ASEAN, platform digital, serta pemangku kepentingan regional dalam upaya membangun ekosistem digital yang lebih inklusif dan bebas diskriminasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, serta membentuk identitas sosial. Kehadiran internet dan platform media sosial tidak hanya mempercepat penyebaran informasi lintas negara, tetapi juga menghadirkan ruang baru bagi ekspresi budaya sekaligus munculnya prasangka dan diskriminasi rasial. Rasisme, yang sejak lama menjadi persoalan sosial dan politik dalam kehidupan manusia, kini memperoleh medium baru yang lebih luas, cepat, dan sulit dikontrol, yaitu ruang digital (Benjamin, 2019).

Dalam konteks Asia Timur dan Asia Tenggara, meluasnya Korean Wave (Hallyu)—meliputi K-Pop, drama Korea, film, kuliner, hingga gaya hidup Korea—telah melahirkan dinamika budaya yang cukup kompleks. Di satu sisi, Hallyu membuka peluang apresiasi lintas budaya dan memperkuat hubungan antarwarga masyarakat. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga memperlihatkan adanya ketimpangan persepsi rasial dalam jejaring digital, seperti unggahan bernuansa diskriminatif, stereotip negatif terhadap masyarakat Asia Tenggara di media sosial Korea, serta narasi superioritas budaya yang memandang rendah identitas masyarakat Asia Tenggara (Noble, 2018).

Salah satu contoh nyata tampak pada maraknya komentar rasis di platform seperti YouTube, Twitter/X, dan komunitas daring Korea seperti DCInside serta Naver Cafe, yang menyasar masyarakat Asia Tenggara—khususnya dari Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand—melalui stereotip yang merendahkan. Konten semacam ini sering menyebar secara luas, memicu konflik antarnetizen, bahkan memengaruhi persepsi publik serta hubungan diplomatik antarnegara yang terkait (Daniels, 2009).

Literasi digital, yang dipahami sebagai kemampuan untuk mengakses, menilai, menggunakan, dan menghasilkan konten secara kritis serta etis di ruang digital, menjadi faktor penting dalam memahami persoalan tersebut. Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pengguna internet—baik di Korea Selatan maupun negara-negara Asia Tenggara—sering berkontribusi terhadap penyebaran konten rasis sekaligus kegagalan dalam mengenali dan melawan narasi diskriminatif (Lee & Park, 2021).

Artikel ini bertujuan untuk: (1) memetakan berbagai bentuk rasisme digital dalam hubungan Korea Selatan dan Asia Tenggara; (2) menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan memperkuat rasisme digital tersebut; (3) mengkaji peran literasi digital sebagai mekanisme pencegahan dan penanganan konflik rasial di ruang siber; serta (4) merumuskan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan terkait.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berbasis studi pustaka sistematis (*systematic literature review*) dan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Data diperoleh dari berbagai jurnal akademik internasional yang terindeks di Google Scholar, Scopus, dan Web of Science, dengan kata kunci seperti “digital racism,” “South Korea Southeast Asia,” “digital literacy hate speech,” “Hallyu discrimination,” dan “online racism Asia.”

Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup: (1) artikel yang diterbitkan pada periode 2010–2024; (2) membahas isu rasisme digital atau literasi digital dalam konteks Asia Timur maupun Asia Tenggara; serta (3) menggunakan metodologi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap awal, lebih dari 60 artikel berhasil diidentifikasi, kemudian diseleksi hingga tersisa 30 artikel utama yang dinilai relevan untuk dianalisis lebih mendalam.

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan-temuan literatur ke dalam tiga tema utama, yaitu: (1) pola dan bentuk rasisme digital, (2) faktor pendorong dan penghambat, serta (3) peran literasi digital sebagai bentuk intervensi. Untuk memastikan validitas interpretasi, penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi teoritis dengan merujuk pada teori rasisme, literasi media, dan komunikasi antarbudaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Rasisme Digital Korea Selatan terhadap Asia Tenggara

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap masyarakat Asia Tenggara di Korea Selatan—baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di ruang digital—merupakan fenomena yang telah terdokumentasi secara jelas. Lee dan Park (2021) menemukan bahwa warga Asia Tenggara, terutama pekerja migran dan pelajar di Korea Selatan, secara konsisten menghadapi perlakuan diskriminatif berupa stereotip seperti “kotor,” “miskin,” dan “kriminal” di media sosial. Stereotip tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan merefleksikan struktur sosial-ekonomi Korea Selatan yang menekankan homogenitas etnis dan superioritas nasional.

Kim (2020) mengidentifikasi bahwa meskipun pemerintah Korea Selatan telah menerapkan kebijakan multikulturalisme sejak 2006, implementasinya di tingkat masyarakat—termasuk di ruang digital—masih belum optimal. Kebijakan yang ada cenderung menitikberatkan pada asimilasi dibanding pengakuan terhadap keberagaman, sehingga belum mampu menyentuh akar ideologis rasisme secara efektif.

Hadley dan Tanaka (2021) mendokumentasikan adanya peningkatan signifikan ujaran kebencian anti-Asia Tenggara di platform digital Korea selama pandemi COVID-19. Dalam situasi tersebut, narasi xenofobik dan rasis diperkuat oleh ketakutan terhadap

penyakit serta ketidakpastian ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis global dapat menjadi pemicu menguatnya rasisme digital yang sebelumnya telah ada.

Dalam konteks budaya populer dan K-Pop, Park (2022) menemukan bahwa komunitas penggemar K-Pop global—yang banyak terdiri dari masyarakat non-Korea dari Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin—tetap tidak terlepas dari dinamika rasisme. Terdapat pola diskriminasi anti-Kulit Hitam (anti-Blackness) dalam komunitas fandom daring, termasuk penggunaan hinaan rasial dan penolakan terhadap anggota komunitas berkulit gelap.

Faktor Struktural yang Memperkuat Rasisme Digital

Terdapat sejumlah faktor struktural yang berkontribusi terhadap bertahannya dan meningkatnya rasisme digital dalam hubungan Korea Selatan dan Asia Tenggara. Pertama, desain algoritma media sosial yang memprioritaskan konten dengan tingkat keterlibatan tinggi—termasuk konten kontroversial dan emosional—secara tidak langsung mendorong penyebaran konten rasis karena jenis konten tersebut biasanya memperoleh lebih banyak respons (Tufekci, 2018; van Dijck, Poell, & de Waal, 2018).

Kedua, ketimpangan kekuatan ekonomi dan budaya antara Korea Selatan dan negara-negara Asia Tenggara menciptakan relasi yang asimetris, sehingga narasi stereotip lebih mudah mengalir dari pihak yang memiliki dominasi budaya lebih besar. Castells (2015) menyatakan bahwa dalam jaringan komunikasi global, pihak yang memiliki “kekuatan jaringan” lebih besar memiliki kemampuan lebih luas dalam membentuk dan menyebarkan narasi mengenai “yang lain.”

Ketiga, lemahnya regulasi konten digital lintas negara menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelaku ujaran kebencian rasial beroperasi dengan konsekuensi yang minim. Flew (2019) menyebut bahwa “krisis kepercayaan” terhadap institusi digital, termasuk perusahaan platform global, memperumit upaya pengendalian konten berbahaya di ruang daring.

Keempat, rendahnya tingkat literasi digital di sebagian negara Asia Tenggara—yang dipengaruhi oleh kesenjangan akses teknologi dan minimnya pendidikan literasi digital yang sistematis—menempatkan masyarakat pada posisi rentan terhadap disinformasi dan konten rasis tanpa kemampuan memadai untuk mengenali maupun melawannya (Nguyen et al., 2020).

Literasi Digital sebagai Mekanisme Pencegahan Konflik

Walaupun tantangannya cukup besar, literasi digital yang baik terbukti menjadi salah satu faktor protektif utama dalam menghadapi rasisme digital. Cho dan Park (2019) menemukan bahwa individu dengan tingkat literasi digital tinggi tidak hanya lebih mampu mengenali konten rasis, tetapi juga lebih aktif melaporkan konten tersebut, merespons secara kritis, dan terlibat dalam advokasi daring melawan diskriminasi.

Lim (2018) menekankan pentingnya media digital dan literasi digital dalam mendukung gerakan sosial di Asia Tenggara, termasuk gerakan yang memperjuangkan hak-hak migran dan perlawanan terhadap diskriminasi. Kemampuan memproduksi, menyebarkan, dan memvalidasi kontra-narasi menjadi sarana perlawanan yang efektif bagi komunitas yang menjadi sasaran rasisme digital.

Daniels (2009) menunjukkan bahwa program literasi digital yang memasukkan unsur anti-rasisme—seperti sejarah rasisme, pemahaman algoritma, dan keterampilan verifikasi fakta—secara signifikan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengenali dan menolak konten rasis di internet. Hal ini menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi juga harus dipadukan dengan kesadaran sosial dan historis.

Nguyen et al. (2020) menyoroti pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam program literasi digital bagi masyarakat Asia yang rentan mengalami diskriminasi daring. Program yang paling efektif adalah program yang dikembangkan bersama komunitas sasaran, bukan hanya ditujukan kepada mereka.

Respons Kelembagaan dan Kebijakan yang Ada

Berbagai upaya kelembagaan telah dilakukan untuk mengatasi rasisme digital di kawasan ini. Di Korea Selatan, Korea Communications Standards Commission (KCSC) memiliki kewenangan untuk meninjau dan menghapus konten digital yang melanggar standar komunikasi, termasuk ujaran kebencian berbasis ras. Namun, efektivitasnya dalam menangani konten yang menysar warga asing dan kelompok diaspora masih menjadi perdebatan.

Di tingkat ASEAN, terdapat sejumlah inisiatif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk melalui ASEAN Digital Masterplan 2025 yang memuat pengembangan kapasitas digital. Akan tetapi, Lim (2018) menilai bahwa berbagai inisiatif regional tersebut masih bersifat terfragmentasi dan belum memiliki mekanisme penegakan yang kuat, sehingga pengaruhnya terhadap pengurangan rasisme digital masih terbatas.

Platform media sosial besar seperti YouTube, Twitter/X, dan TikTok juga telah menerapkan kebijakan anti-ujaran kebencian dalam ketentuan layanan mereka. Meski demikian, konsistensi penegakan kebijakan tersebut—khususnya untuk konten berbahasa Korea dan bahasa Asia Tenggara—masih menjadi persoalan serius akibat keterbatasan moderator konten yang memahami aspek bahasa dan budaya secara memadai (Roberts, 2019; Flew, 2019).

Menuju Model Literasi Digital Anti-Rasisme

Berdasarkan hasil kajian, artikel ini mengusulkan model literasi digital anti-rasisme (anti-racism digital literacy) yang berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu kesadaran kritis, aksi etis, dan partisipasi transformatif.

Pertama, kesadaran kritis (*critical awareness*) mengacu pada kemampuan memahami bagaimana teknologi digital bekerja dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk cara algoritma mereproduksi bias, cara platform mendistribusikan konten secara tidak seimbang, dan cara narasi dominan membentuk persepsi mengenai “yang lain.” Komponen ini memerlukan integrasi pendidikan sejarah rasisme, studi media, dan pemahaman dasar mengenai algoritma ke dalam kurikulum literasi digital.

Kedua, aksi etis (*ethical action*) mencakup kemampuan merespons konten rasis secara konstruktif, mulai dari melaporkan konten kepada platform, memberikan tanggapan berbasis fakta terhadap narasi diskriminatif, hingga terlibat dalam kampanye daring yang mendukung keberagaman. Dimensi ini juga mencakup pemahaman mengenai konsekuensi hukum ujaran kebencian digital serta tanggung jawab etis pengguna dalam ekosistem digital.

Ketiga, partisipasi transformatif (*transformative participation*) merupakan dimensi tertinggi dalam model ini, yaitu ketika pengguna tidak hanya bersikap defensif terhadap rasisme digital, tetapi juga aktif menciptakan dan menyebarkan konten yang merayakan keberagaman, membangun jembatan budaya, serta menantang narasi rasisme secara sistematis. Castells (2015) menyebut potensi ini sebagai bentuk “counter-power” dalam jaringan komunikasi global.

Model ini sejalan dengan pandangan UNESCO (2013) yang menegaskan bahwa literasi digital dan media bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan fondasi penting bagi kewarganegaraan yang bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis dan plural. Dalam konteks hubungan Korea Selatan dan Asia Tenggara, penerapan model ini perlu mempertimbangkan kondisi budaya masing-masing masyarakat, termasuk perbedaan nilai komunikasi, persepsi terhadap hierarki sosial, dan tingkat kepercayaan terhadap institusi.

SIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini telah mengkaji rasisme digital dalam hubungan Korea Selatan–Asia Tenggara dari perspektif literasi digital. Beberapa kesimpulan utama dapat ditarik. Pertama, rasisme digital dalam konteks ini bukan merupakan fenomena yang terisolasi, melainkan terhubung secara erat dengan struktur sosial-ekonomi, sejarah kolonialisme, ketimpangan kekuasaan kultural, dan desain teknologi yang tidak netral. Kedua, literasi digital yang komprehensif—yang melampaui keterampilan teknis dan mencakup dimensi kritis, etis, dan transformatif—merupakan salah satu respons paling efektif terhadap tantangan rasisme digital. Ketiga, pendekatan yang berhasil harus bersifat multistakeholder, melibatkan pemerintah, platform teknologi, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil.

Berdasarkan temuan-temuan ini, artikel ini merekomendasikan: (1) integrasi modul literasi digital anti-rasisme ke dalam kurikulum pendidikan formal di Korea Selatan dan negara-negara ASEAN; (2) penguatan kapasitas moderasi konten platform media sosial dalam bahasa-bahasa Asia Tenggara; (3) pengembangan regulasi regional yang mengatur

ujaran kebencian berbasis digital dengan mekanisme penegakan yang efektif; (4) investasi dalam penelitian komparatif tentang efektivitas program literasi digital anti-rasisme di berbagai konteks kultural Asia; serta (5) penguatan dialog budaya Korea Selatan–Asia Tenggara melalui platform digital sebagai kontra-narasi terhadap stereotip dan diskriminasi.

Artikel ini mengakui keterbatasannya dalam hal akses langsung ke data primer dari komunitas-komunitas yang terdampak. Penelitian lanjutan dengan pendekatan etnografi digital dan wawancara mendalam dengan pengguna internet dari kedua kawasan akan sangat memperkaya pemahaman kita tentang fenomena ini. Selain itu, kajian longitudinal tentang dampak program literasi digital terhadap penurunan insiden rasisme daring juga menjadi agenda penelitian yang mendesak.

DAFTAR REFERENSI

- Castells, M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Cho, J. , & P. S. (2019). Digital Literacy and Online Racism: Evidence from South Korea. *Information, Communication & Society*, 22(9), 1315–1330.
- Daniels, J. (2009). *Cyber Racism: White Supremacy Online and the New Attack on Civil Rights*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Flew, T. (2019). Digital Communication, the Crisis of Trust, and the Post-Global. *Communication Research and Practice*, 5(1), 4–22.
- Hadley, A. , & T. M. (2021). Online Hate Speech Targeting Southeast Asian Communities in East Asia During COVID-19. *Media, Culture & Society*, 43(5), 900–917.
- Kim, H. (2020). Racism and Multiculturalism in South Korea: Policy Responses and Challenges. *Asian Ethnicity*, 21(3), 322–340.
- Lee, M., & Park, J. (2021). Anti-Southeast Asian Discrimination in South Korea: A Social Media Analysis. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(11), 2519–2536.
- Lim, M. (2018). Roots, Routes, and Routers: Communications and Media of Contemporary Social Movements in Southeast Asia. *Journalism & Communication Monographs*, 20(2), 92–136.
- Nguyen, T., T., H. D., Pérez-Stable, E. J., & Kaholokula, J. K. (2020). Discrimination and Adverse Experiences Among Asian American Youth. *JAMA Pediatrics*. <https://doi.org/10.1001/Jamapediatrics.2020.0351>, 174(7), 672–678.

Park, J.-H. (2022). K-Pop Fandom and Anti-Blackness: Examining Racial Discourse in Korean Online Communities. *Popular Music and Society*, 45(2), 185–202.

UNESCO. (2013). Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines. Paris: UNESCO.